

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL HUTAN DAN SANKSI HUKUM
BAGI MASYARAKAT YANG MEMUNGUT TANPA IZIN YANG SAH
(Studi Kasus Putusan No. 99/Pid.B/LH/2017/PN Pti.)**

Rizki Zega Alan Ferdian¹, Much Nurachmad ., S.T., S.H., M.Hum²

¹UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

rzkgzega@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya dengan sumber daya hutan yang luas. Pemanfaatan sumber daya hutan guna kepentingan dan kemakmuran serta kemajuan negara. Dalam pemanfaatan hasil hutan diperlukan perizinan yang mengatur pemanfaatan hasil hutan seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) agar pemanfaatan hasil hutan dapat dilakukan secara teratur dengan tetap menjaga kelestariannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait Penerapan Terhadap Pemungut Kayu Tanpa Izin Yang Sah serta Pencurian Kayu Yang Diangkut Tanpa Izin di dalam Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2017/PN Pti. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pembahasannya menguraikan penerapan hukum terhadap pemungut kayu tanpa izin yang sah berdasarkan putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2017/PN Pti dan perlindungan hukum terhadap pemungut hasil hutan dalam putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2017/PN Pti. Maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwa dalam penerapan hukum terhadap pemungut kayu tanpa izin yang sah berdasarkan putusan tersebut masih kurang tepat karena Majelis Hakim seharusnya mendakwakan Pasal 87 ayat (3) Undang-undang No. 18 tahun 2013 dan bukan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 18 tahun 2013. Kemudian mengenai perlindungan hukum terhadap pemungut hasil hutan dalam putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2017/PN Pti tidak tercapai, mengingat masyarakat sekitar hutan sangat bergantung mata pencahariannya dalam pemanfaatan hasil hutan, sebagaimana telah diatur perlindungan tersebut didalam Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kata Kunci: Pencurian kayu, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Hutan.

ABSTRACT

Indonesia is a country rich in natural resources with extensive forest resources. Utilization of forest resources for the benefit and prosperity and progress of the country. In the utilization of forest products, it is necessary to have a permit that regulates the use of forest products, such as a Certificate of Legality of Forest Products (SKSHH) so that the utilization of forest products can be carried out regularly while maintaining their sustainability. This study aims to analyze the application of illegal timber collectors and the theft of timber transported without a permit in Decision Number 99/Pid.B/LH/2017/PN Pti. This research uses normative research with a statute approach and a case approach. The discussion outlines the application of the law against illegal logging collectors based on the decision Number 99/Pid.B/LH/2017/PN Pti and legal protection for forest product collectors in the decision Number 99/Pid.B/LH/2017/PN Pti. So hereby the author concludes that in applying the law to wood collectors without a valid permit based on the decision it is still not appropriate because the Panel of Judges should indict Article 87 paragraph (3) of Law no. 18 of 2013 and not Article 83 paragraph (1) letter b of Law no. 18 of 2013. Then the legal protection for forest product collectors in the decision Number 99/Pid.B/LH/2017/PN Pti was not achieved, considering that the community around the forest is very dependent on their livelihoods in the use of forest products, as has been stipulated in the protection in Article 58 Paragraph (1) Law on Prevention and Eradication of Forest Destruction.

Key Word: Wood theft, Legal Certificate of Forest Products, Forest